

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 | 0 | 1 | 7



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Jajaki Pembatalan Pembelian Lahan Sumber Waras

Yayasan Kesehatan Sumber Waras sepakat menyelesaikan masalah lahan secara kekeluargaan.

Avit Hidayat

avit.hidayati@tempo.co.id

JAKARTA — Pemerintah DKI Jakarta menjajaki opsi pembatalan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras demi menjalankan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan. "Kalau tidak bisa dikembalikan (kecuali uangnya), tentunya pembatalan itu opsi pertama," kata Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno di Balai Kota, kemarin.

Sandiaga kemarin mengadakan pertemuan tertutup dengan pengurus Yayasan Kesehatan Sumber Waras sejaku pemilik lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Selepas pertemuan, ia mengatakan pemerintah DKI berharap masalah lahan dengan Sumber Waras bisa diselesaikan secara keluargaan, sehingga tak perlu beranjung di pengadilan.

Pada masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama,

pemerintah DKI membeli lahan Sumber Waras dengan harga Rp 755,686 miliar. Saat itu, pemerintah DKI mengacu pada nilai jual obyek pajak (NJOP) terbarat, yakni Rp 20 juta per meter persegi.

Pada 2015, BPK menyatakan pembelian lahan Sumber Waras bermasalah. BPK antara lain menilai harga lahan seluas 3,7 hektare di Jalan Kyai Tapa, Jakarta Barat, itu terlalu mahal sehingga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 191 miliar. Lembaga tersebut meminta pemerintah DKI menagih kelebihan uang pembayaran atau membatalkan pembelian lahan.

Tak lama setelah dilantik, Sandiaga meminta Sumber Waras mengerikan sebagian dana pembelian lahan. Menurut dia, penyelesaian kasus lahan Sumber Waras sangat penting agar pemerintah Jakarta mendapat status wajar tanpa pengecualian

dalam audit BPK pada tahun-tahun mendatang.

Pengurus Yayasan Sumber Waras, S. Noerdin, mengatakan sepakat menyelesaikan masalah lahan Sumber Waras secara keluargaan. "Kami oke-oke saja, kalau dibebulkan juga enggak masalah," kata dia. Meski begitu, Noerdin mengakui, pertemuan belum mencapai kesepakatan final. "Intinya supaya persoalannya selesai, tidak berlarut-larut."

Noerdin mengaku memahami keinginan pemerintah Jakarta agar pembelian lahan Sumber Waras dianggap wajar oleh BPK. Apalagi, menurut dia, setelah selesai urusan dengan BPK, pemerintah DKI tak menutup kemungkinan untuk membeli lagi lahan Sumber Waras. Sebab, kepada pengurus, Sandiaga mengatakan lahan tersebut masih dibutuhkan untuk membangun rumah sakit spesialis kanker.

Perclesaian kasus lahan Sumber Waras, menurut Sandiaga, juga merupakan bagian dari upaya penyisiran aset milik pemerintah Jakarta. Sandiaga menar-

getkan kasus Sumber Waras bisa selesai bulan ini, sebelum BPK memulai audit keuangan Jakarta awal tahun depan.

Kepala Badan Pengelola Aset Daerah DKI, Achmad Firdaus, mengatakan lembaganya telah mendata 98,3 persen aset milik daerah. Dari aset total DKI senilai Rp 450 triliun, saat ini masih ada sejumlah aset senilai Rp 4 triliun yang belum didata.

Kepala Kantor Perwakilan BPK Provinsi DKI Jakarta, Bambang Utoyo, mengatakan Sandiaga juga menuntut instansinya mengawali pendataan aset tersebut. "Kami meyakinkan apa yang dilakukan Badan Pengelola Aset sudah berada di jalur yang benar," ujar Bambang.

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7



Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Indopos Pos Kota Warta Kota

DKI Jajaki Pembatalan Pembelian Lahan Sumber Waras

Antara Tuduhan dan Fakta

Badan Pemeriksa Keuangan, pada Juni dan Desember 2015, menerbitkan hasil audit yang mempermasalkan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh pemerintah DKI Jakarta di masa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Majalah Tempo kemudian menelusuri proses jualbeli lahan tersebut dan menurunkan laporannya pada edisi 28 Maret 2016.

Berikut ini beberapa poin tuduhan BPK, tanggapan Gubernur Basuki, dan hasil penelusuran Tempo.

BPK

PADA LAPANGAN

WARTA

Lokasi Lahan

Jalan Tomang Utara

- Sertifikat HC3 nomor 2878 tahun 1998 dan faktur pajak menyebutkan lahan Sumber Waras terletak di Jalan Kyai Tapa.

Jalan Kyai Tapa

Karena fisik bangunan ada di Tomang Utara, NJOP ada 20.4 seharusnya Rp 7.445 juta per meter persegi,

- Peta Zona Nilai Tanah Direktorat Pajak menunjukkan lahan Sumber Waras ada dalam satu kawasan berkode 'AB'
- Pada 2014, NJOP lahan dengan kode 'AB' adalah Rp 20.755 juta per meter persegi.

Lokasi lahan masih Kyai Tapa, sehingga NJOP 2014 adalah Rp 20.755 juta per meter persegi.

Proses Pengadaan

Tidak sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71/2012 tentang Penyelegaraan Pengadaan Tanah. Isinya: pembelian tanah di atas 1 hektar harus melalui studi kelayakan dan tidak boleh lewat penunjukan angsuran.

- Perpres 71/2012 sudah direvisi oleh Perpres 40/2014.
- Revisi aturan Instruktur Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 24 April 2014, sebelum ada kesepakatan antara pemerintah DKI dan Sumber Waras.

Mengacu pada Perpres Nomor 10/2014 tentang Penyelegaraan Pengadaan Tanah. Isinya: pembelian tanah di bawah 5 hektare tidak memerlukan kalian panjang dan bisa lewat penunjukan langsung.

Kerugian Negara

Pemerintah DKI komahalan membayar lahan Sumber Waras. Ada kerugian sekitar Rp 191,3 miliar karena token itu benda cipta PT Ciputra Karya Unggul seharga Rp 564,4 miliar pada 2013.

- Meski niyut lahan sesuai dengan NJOP 2014, pemerintah DKI pada dasarnya membayar lebih banyak karena:
- Pajak dan bea halik nama sekitar Rp 57,49 miliar ditanggung Sumber Waras.
- Biaya jasa notaris sekitar Rp 32,49 miliar ditanggung Sumber Waras.
- Pemerintah DKI tak membayar bangunan yang semula dihargai Sumber Waras Rp 25 miliar.

Harga pembelian pemerintah DKI pada 2014 dengan nilai total Rp 755,689 miliar tak bisa dibandingkan dengan harga penawaran Ciputra pada 2013, sebelum kenaikan NJOP.